

**KOLABORASI DINAS SOSIAL DENGAN SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DALAM PEMBINAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS GUNA
MENJAGA KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
DI BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Hesti Virra Adventia

NPP. 30.0756

Asdaf Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Program Studi Praktik Perpolisian Dan Tata Pamong

Email: hestivirra@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Ir. Hj. Sri Hartati, M.P

ABSTRACT

Problem Statement: *The Collaboration of the Social Service with the Civil Service Police Unit on the Development of Homeless and Beggars to Maintain Peace and Public Order at the Social Rehabilitation Center for Bina Karya and Laras of Yogyakarta Special Region Province needs to be done to reduce the problem of homeless and beggars due to poverty, lack of job skills, low education levels, environment, socio-culture, health, and so on. **Purpose :** The writing is to analyze the collaboration between the Social Service and the Civil Service Police Unit in fostering vagrants and beggars in order to maintain public peace and order at the Bina Karya and Laras Social Rehabilitation Center and the supporting and inhibiting factors in carrying out their duties. **Method :** The theory used is using Ansell and Gash's Collaborative Governance theory and Miftah Thoha's coaching theory. This writing uses qualitative writing with descriptive methods and inductive data analysis. **Result :** The results of the writing show that the collaboration of the Social Service and the Civil Service Police Unit has been running quite well by carrying out its main tasks and functions. The inhibiting factor for collaboration is the lack of capacity. Supporting factors for collaboration are the existence of Yogyakarta Special Region Regulation Number 1 of 2014 concerning Handling of Homeless and Beggars and the commitment between the Social Service and the Pamong Praja Police Unit to agree to handle homeless and beggars. **Conclusion :** Efforts made by conducting preventive, coercive, rehabilitation, and social reintegration efforts.*

Keywords: *Homeless, Beggars, Development, Peace, Public Order*

ABSTRAK

Pemasalahan : Kolaborasi Dinas Sosial Dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis guna menjaga Ketenteraman dan Ketertiban

Umum Di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu dilakukan untuk mengurangi permasalahan gelandangan dan pengemis karena kemiskinan, kurangnya keterampilan kerja, tingkat pendidikan yang rendah, lingkungan, sosial budaya, kesehatan, dan sebagainya. **Tujuan** : untuk menganalisis kolaborasi Dinas Sosial dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pembinaan gelandangan dan pengemis guna menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras serta faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan tugasnya. **Metode** : Teori yang digunakan adalah menggunakan teori Collaborative Governance Ansell dan Gash dan teori pembinaan Miftah Thoha. Penelitian ini dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan analisis data secara induktif. **Hasil** : Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja telah berjalan cukup baik dengan melakukan tugas pokok dan fungsinya. Faktor penghambat kolaborasi adalah kurangnya daya tampung atau kapasitas yang dimiliki. Faktor pendukung kolaborasi adalah adanya Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis dan komitmen antara Dinas Sosial dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk bersepakat menangani gelandangan dan pengemis. **Kesimpulan** : Upaya yang dilakukan dengan melakukan upaya preventif, koersif, rehabilitas, dan reintegrasi sosial.

Kata Kunci : Gelandangan, Pengemis, Pembinaan, Ketenteraman, Ketertiban Umum

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang terus-menerus dihadapi oleh negara-negara berkembang. Akibat dari permasalahan tersebut yang terjadi di kehidupan masyarakat yaitu gelandangan dan pengemis. Permasalahan sosial ini terjadi karena terkait dengan kemiskinan, kurangnya keterampilan kerja, tingkat pendidikan yang rendah, lingkungan, sosial budaya, kesehatan, dan sebagainya.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pusat pendidikan, pusat budaya dan tujuan wisata sehingga memberikan daya tarik bagi warga yang datang baik dari dalam maupun luar kota. Pada kesempatan inilah masyarakat kurang mampu datang ke Yogyakarta dari daerah tertentu di Yogyakarta atau provinsi lain. Namun kenyataannya masih banyak orang yang hidupnya miskin bahkan tidak teratur.

Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan upaya dalam menanggulangi masalah gelandangan dan pengemis. Gelandangan dan pengemis biasa disingkat dengan gepeng. Menanggulangi permasalahan ini dilakukan dengan upaya untuk meminimalisir terjadi gelandangan dan pengemis di Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta. Permasalahan yang terjadi tentunya perlu adanya kerjasama antar lembaga serta seluruh lapisan masyarakat.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis dijelaskan bahwa gelandangan dan pengemis adalah masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, kekurangan, keterbatasan, ketidaksetaraan dan kehidupan yang tidak memadai tanpa martabat, yang oleh karena itu perlu diatasi secara efektif, terpadu dan berkelanjutan, memastikan kepastian hukum untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ketertiban umum. Penanggulangan gelandangan dan pengemis karena mencegah terjadinya pergelandangan dan pengemis di lingkungan masyarakat, memberdayakan gelandangan dan pengemis, mengembalikan mereka ke kehidupan yang layak, serta mewujudkan ketertiban umum. Hal ini termasuk dengan fungsi Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan tugasnya serta membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan terutama pada bidang sosial. Tugas Dinas Sosial dalam memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dapat menciptakan kehidupan yang harmonis dalam masyarakat dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya untuk menangani gelandangan dan pengemis di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, karena itu dibutuhkan kolaborasi antar lembaga pemerintahan dalam meminimalisir terjadinya gelandangan dan pengemis.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Kolaborasi yang terjadi antara Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam memberikan pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis diharapkan mampu memberikan ketenteraman dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat. Sebelum terjadinya adanya kolaborasi banyaknya gelandangan dan pengemis yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, sehingga perlu adanya kolaborasi antar organisasi perangkat daerah dalam mengurangi hal tersebut. Gelandangan dan pengemis yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta setiap tahun mengalami pertumbuhan yang tinggi. Kenaikan jumlah terjadi karena melemahnya kekuatan ekonomi makro negara dan kebijakan ekonomi dari pemerintah yang belum merangsang tumbuhnya lapangan kerja baru bagi masyarakat. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki banyak tempat wisata sehingga memberikan daya tarik bagi warga yang datang baik dari dalam maupun luar kota, kesempatan inilah yang membuat masyarakat yang kurang mampu untuk datang dan tinggal di Yogyakarta. Namun pada kenyataannya masih banyak orang yang hidupnya masih miskin bahkan tidak teratur.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian (Cut Naisa Zahara, Mukhrijal, dan Wais Alqarani. 2022) mengenai penerapan *Model*

Collaborative Governance pada Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh yang berkaitan dengan penerapan model Collaborative Governance berjalan dengan baik dengan pemerintah membantu menyediakan pelatihan keterampilan kerja bagi yang belum memiliki kerja. Penelitian (Nyoman Augusto Mardika. 2022) berkaitan dengan kolaborasi penanggulangan gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan yaitu Adanya sinergitas yang baik antara Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja sehingga penanggulangan gelandangan dan pengemis dapat berjalan baik, serta rendahnya mental masyarakat, dan kolaborasi penanggulan gelandangan dan pengemis oleh organisasi perangkat daerah telah berdasarkan rencana dan strategis dalam rangka mendukung visi dan misi. Penelitian (Charles Irving Christian Pasaribu.2022) menggunakan Kolaborasi Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Sosial dalam pemberdayaan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Kotawaringin Timur terkait dengan pemberdayaan yang dilakukan sudah berjalan dengan baik, tetapi dalam hal komunikasi masih belum semua perangkat hadir dalam mengadakan rapat sehingga komunikasi masih kurang jelas..

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana penelitian yang dilakukan yakni lokasi penelitian yang dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menunjukkan lokasi yang berbeda menunjukkan bahwasanya tingkat kompleksivitas permasalahan yang ada itu sangat berbeda dibandingkan dengan penelitian yang terdahulu yang dilakukan.

1.5 Tujuan

Tujuan ini difokuskan terhadap sasaran yang ingin dicapai oleh penulis. Tujuan dari penulisan ini untuk menganalisis kolaborasi Dinas Sosial dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pembinaan gelandangan dan pengemis guna menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras serta faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan tugasnya.

II. METODE

Metode penelitian yang dilakukan peneliti dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dipilih oleh penulis dalam melakukan penelitian. Dijelaskan oleh Sugiyono(2014) bahwa dalam memperoleh sumber data dapat dilakukan melalui sumber data primer dan sumber data sekunder. Prosedur yang dilakukan dalam pengambilan data menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan Teknik Triangulasi yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3. 1 Proses Collaborative Governance

1. Kondisi Awal

Penyebab dari terjadinya gelandangan dan pengemis dikarenakan tidak memiliki tempat tinggal, pegawai swasta yang di PHK, gangguan mental, penghasilan yang lebih tinggi apabila mengemis daripada bekerja yang layak dengan gaji yang kecil, serta masyarakat pendatang yang bukan penduduk asli untuk mencari pekerjaan tetapi belum dapat. Wawancara diatas juga menjelaskan terkait dengan aduan masyarakat terkait dengan “manusia silver” yang sudah membuat keresahan bagi warga masyarakat sekitar. “Manusia Silver” merupakan salah satu bentuk cara mengemis di lingkungan masyarakat yang terjadi.

Gambar 3.1
Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja terhadap “Manusia Silver”



Sumber: Dokumentasi Penulis terhadap Penertiban Manusia Silver

Tabel 3.1
Data Penertiban Gelandangan dan Pengemis
Bulan Januari Tahun 2022 dan Bulan Januari 2023

Bulan	Gelandangan	Pengemis	Jumlah
m Januari 2022	11	37	48
b Januari 2023	13	45	58

Sumber: Data diolah oleh Penulis Tahun 2023 (Berdasar dari Data Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Berdasar data diatas menjelaskan terkait jumlah gelandangan dan pengemis yang ada di Bulan Januari. Dibandingkan tahun lalu dengan jumlah gelandangan yang lebih sedikit daripada diawal bulan tahun 2023 yang semakin meningkat. Jumlah total yang sama di bulan Januari tahun 2022 sebanyak 48 sedangkan di tahun 2023 di Bulan Januari sebanyak 58, selisih yang cukup tinggi perbedaanya terhadap tingkat jumlah gelandangan dan pengemis di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Desain Kelembagaan

Desain Kelembagaan terkait dengan Collaborative Governance adalah proses kolaborasi berkaitan dengan sistematika dalam pelaksanaan kolaborasi untuk prosedural. Berdasar pada Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan pengemis, dari Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana dalam menjangkau dan menertibkan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengganggu ketenteraman masyarakat, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Dinas Sosial memiliki tugas dalam memberikan rehabilitasi bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial agar mampu mengembalikan fungsi sosialnya sehingga dapat diterima di masyarakat dan keluarga.

3. Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan fasilitatif berkaitan dengan diskusi dilakukan oleh stakeholders, penetapan aturan dasar yang jelas, membangun saling kepercayaan, memfasilitasi dialog antar stakeholders dan pembagian keuntungan bersama. Dinas Sosial dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Dinas Sosial yang paling mendominasi dalam pemberian pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis atau penyandang masalah kesejahteraan sosial sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja mendominasi terhadap menjaga ketenteraman masyarakat, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

4. Proses Kolaboratif

Proses kolaboratif merupakan variabel penting, dengan proses kolaboratif dimulai dengan dialog tatap muka berkaitan dengan kepercayaan yang nantinya akan berpengaruh terhadap komitmen didalamnya. Setelah proses kolaborasi para stakeholders tinggi akan teradi suatu pemahaman Bersama untuk menentukan rencana strategis untuk menjalankan kolaborasi.

Gambar 3.2
Penerimaan Gelandangan dan Pengemis di Camp Assesment



Sumber: Dokumentasi Penulis di Camp Assesment

Dokumentasi diatas merupakan pelaksanaan Dinas Sosial dalam melakukan pendataan di Camp Assesment terhadap gelandangan dan pengemis yang masuk setelah Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban dan penjangkauan. Berdasar pada Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis pada Bab III terkait dengan penyelenggaraan dan prosedur penanganan gelandangan dan pengemis. Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan upaya secara koersif dengan melakukan penertiban, penjangkauan, serta pelimpahan yang diserahkan kepada Dinas Sosial untuk dilakukan proses pembinaan. Selanjutnya, di Dinas Sosial dilakukan upaya preventif, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial. Dinas Sosial akan melakukan pengelompokan terhadap gelandangan dan pengemis di Camp Assesment. Setelah dilakukannya pengelompokan di Camp Assesment gelandangan dan pengemis akan menerima rehabilitasi, dan diserahkan kepada Panti Sosial Kemensos RI yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras.

Kerjasama yang terjadi antara Dinas Sosial dengan Satuan Polisi Pamong Praja berdasar pada hasil wawancara yang dilakukan adalah terbuktinya bahwa kerjasama yang terjadi sudah baik. Terbuktinya dengan pelaksanaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban terhadap gelandangan dan pengemis yang ada di Yogyakarta. Setelah pelaksanaan penertiban, Satuan Polisi Pamong Praja menyerahkan gelandangan dan pengemis kepada Dinas Sosial untuk melakukan camp assessment. Disinilah Dinas Sosial memerlukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penertiban yang merupakan tugas pokok dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja. Sedangkan Dinas Sosial dalam pelaksanaannya kepada

pembinaan yang merupakan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Sosial untuk memberikan pembinaan dari segi keterampilan, bermasyarakat serta bersosial kepada masyarakat.

3.2 Pembinaan

Pelaksanaan pembinaan oleh Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras yang dilakukan adalah dengan memberikan keahlian berupa keterampilan, keahlian, dan kekreatifan. Bagi masyarakat yang dibina di Balai Adapun daftar kegiatan yang dilakukan:

Tabel 3.3
Jadwal Kegiatan Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras
Dinas Sosial DIY Tahun 2023

KEGIATAN	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU
PERTANIAN			08.00 - 10.15			
PERTUKANGAN LAS				08.00 - 10.15		
PERTUKANGAN BATU				08.00 - 10.15		
PERTUKANGAN KAYU				08.00 - 10.15		
MONTIR SEPEDA MOTOR				08.00 - 10.15		
MENJAHIT				08.00 - 10.15		
HOME INDUSTRI MEMASAK		13.00 - 15.15				
HOME INDUSTRI KERAJINAN TANGAN	08.00 - 10.15					
BIMB. AGAMA ISLAM	10.30 - 12.00					08.00 - 09.30
BIMB. AGAMA KRISTEN PROTESTAN	10.30 - 12.00					08.00 - 09.30
BIMB. AGAMA KATOLIK	10.30 - 12.00					08.00 - 09.30
BIMB. KEDISIPLINAN			10.30 - 12.45			
PPBN		10.00 - 12.15				
KEWIRUSAHAAN				10.30 - 12.00		
BIM. SOSIAL KEMASYARAKATAN KECAMATAN				10.30 - 14.30		
BIM. SOSIAL KEMASYARAKATAN KELURAHAN				10.30 - 14.30		
KERAJINAN BATIK		08.00 - 10.15			09.00 - 11.15	
BIMBINGAN MENTAL SOSUL	13.00 - 14.30		13.00 - 14.30			
SENAM						
PSIKOLOG					07.30 - 09.00	10.00 - selesai

Sumber: Diolah oleh penulis dari Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras

Berdasarkan jadwal diatas bahwasanya Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras memberikan berupa keahlian dan keterampilan yang bisa dilakukan oleh warga binaannya. Harapan dari Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras mampu mengembalikan fungsi sosial warga binaan dan dapat berkomunikasi dengan masyarakat pada umumnya.

3. 3 Faktor Pendukung dan Penghambat Proses *Collaborative Governance*

Faktor pendukung dalam proses *collaborative governance* dalam pembinaan gelandangan dan pengemis di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah adanya Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan pengemis. Adanya perda ini tentu menjadi pendukung faktor untuk menjalin kolaborasi antara Dinas Sosial dengan Satuan Polisi Pamong Praja terutama pada pembinaan dan menjaga ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat. Selain itu juga adanya komitmen antara Dinas Sosial dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk bersepakat menangani gelandangan dan pengemis untuk menjaga ketenteraman masyarakat, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. faktor penghambat adalah jumlah kapasitas atau daya tampung yang dimiliki di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras. Daya tampung yang dimiliki sebanyak 150 sedangkan pada Tahun 2023 dari balai sudah menampung sebanyak 145. Berdasar pada hasil wawancara tersebut bahwasanya masih ada sebanyak 58 orang yang akan masuk ke balai, tetapi karena daya tampung yang tidak memadai maka dikembalikan ke asal.

3. 4 Upaya yang dilakukan untuk mengatasi Gelandangan dan pengemis guna Menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Upaya mengurangi terjadinya gelandangan dan pengemis dengan melakukan upaya preventif, koersif, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Upaya preventif yang diberikan pemerintah dalam penanganan gelandangan dan pengemis dengan memberikan pelatihan dengan ketrampilan, memfasilitasi dengan tempat tinggal, diberikannya bimbingan sosial. Selanjutnya, upaya koersif yaitu usaha pemerintah dalam melakukan penertiban, penjangkauan, pembinaan. Upaya rehabilitasi pemerintah memberikan usaha dalam Pelaksanaan ini mengakibatkan adanya kerjasama yang dilakukan antara Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam memberikan upaya penanganan gelandangan dan pengemis.

3. 5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis menemukan beberapa temuan dimana kendala yang terjadi di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras yaitu disarankan untuk merenovasi gedung diharapkan mampu menampung lebih gelandangan dan pengemis serta memberi pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis di Daerah Istimewa

Yogyakarta. Harapan dari penulis dari dilakukannya renovasi dapat memberikan rasa aman dan tenteram terhadap masyarakat sehingga menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah Istimewa Yogyakarta.

IV. Kesimpulan

Kolaborasi Dinas Sosial Dengan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Pembinaan Gelandangan dan pengemis dengan menggunakan teori Collaborative Governance pada kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan dan proses kolaborasi dengan ditunjukkan melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara dengan informan bahwa proses pelaksanaan kolaborasi terlaksana dengan baik dengan saling menjalankan tugas pokok dan fungsi yang sesuai. Faktor pendukung dalam proses ini adalah adanya Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan pengemis dan adanya komitmen antara Dinas Sosial dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk bersepakat menangani gelandangan dan pengemis. Faktor penghambat dalam proses Collaborative Governance kurangnya daya tampung yang dimiliki baik di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras. Upaya yang dilakukan dalam mengurangi gelandangan dan pengemis dalam Kolaborasi Dinas Sosial Dengan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Pembinaan Gelandangan dan Pengemis Guna Menjaga Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan melakukan upaya preventif, koersif, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.

Keterbatasan Penelitian. penelitian memiliki keterbatasan utama yakni waktu yang hanya diberikan waktu 2 minggu. Keterbatasan waktu ini menyebabkan observasi yang dilakukan terhadap kegiatan Kolaborasi Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja kurang maksimal.

Arah Masa Depan. Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian oleh karena itu penulis menyarankan supaya ada yang melakukan penelitian lanjutan pada lokasi yang sama serta berkaitan dengan kegiatan Kolaborasi Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pembinaan gelandangan dan pengemis, sehingga lebih mendalam dalam mendapatkan informasi..

V. Ucapan Terima Kasih

Bapak Dr. Hadi Prabowo, M.M selaku Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Bapak Dr. Drs. Udaya MAdjid, M.Pd selaku Dekan Fakultas Perlindungan Masyarakat Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Ibu Dr. Dra. Eva Eviany, M.Si selaku Kepala Program Studi Praktik Perpolisian dan Tata Pamong Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Ibu Gradiana Tefa, S.STP, M.AP selaku Sekretaris Program Studi Praktik Perpolisian dan Tata Pamong Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Ibu Dr. Ir. Hj. Sri Hartati, MP selaku Dosen Pembimbing yang selama ini memberikan bimbingan serta mengarahkan penyusunan skripsi ini, Seluruh Dosen Pengajar, Pelatih, Pamong Pengasuh, dan juga Civitas Akademika IPDN yang telah

memberikan jasa serta dedikasinya dalam pembelajaran selama melaksanakan pendidikan, Segenap keluarga besar Kontingen Daerah Istimewa Yogyakarta, dan adik-adik angkatan XXXI dan XXXII yang selalu membantu dan memberikan semangat, khususnya Saudara Kontingen angkatan XXX yang telah menjadi keluarga kedua, Serta keluarga yang selalu memberika dukungan. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, atas seluruh bantuan, dukungan serta doa yang diberikan.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Cut Naisa Zahara, M. W. (2022). Penerapan Model Collaboratiave Governance Pada Dinas Sosial Dan Dinas Tenaga Kerja Dalam Pembinaan Gelandangan dan pengemis Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK*.
- Mardika, N. A. (2022). Kolaborasi Penanggulangan Gelandangan dan pengemis Di Dinas Sosial Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan . *Repository IPDN*.
- Pasaribu, C. I. (2022). Kolaborasi Satuan Polisi Pamong Praja Dengan Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Gelandangan dan pengemis Di Kabupaten Kotawaringin Timur. *Repository IPDN*.

